

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pencapaian tujuan suatu organisasi sangat tergantung kepada ada tidaknya kerja sama antara atasan dan bawahan. Artinya keberhasilan pimpinan dalam membawa/memimpin organisasi kepada tujuan yang diinginkan sangat bergantung pula kepada bawahannya. Jadi seorang pimpinan dalam jenis organisasi apapun, baik swasta maupun organisasi pemerintah tidak akan mungkin berhasil tanpa bantuan bawahan.

Semakin besar suatu organisasi maka masalah-masalah yang dihadapi akan semakin banyak dan kompleks pula. Untuk itu maka pimpinan memerlukan bantuan orang lain dalam menangani sebagian dari tugas-tugasnya yang banyak dan kompleks tersebut. Kebutuhan akan bantuan orang lain ini menimbulkan suatu kebijaksanaan yang harus diambil oleh pimpinan organisasi tersebut. Kebijakan ini menyangkut masalah pelimpahan wewenang kepada bawahan demi kelancaran tugas yang dijalankan. Bila pimpinan organisasi mengabaikan masalah pelimpahan wewenang maka tugas pimpinan akan menjadi berat sehingga dapat mengakibatkan penimbunan tugas yang tidak terpikul. Hal ini berarti tugas-tugas yang dianggap begitu penting tidak dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya karena semua pekerjaan diurus oleh pimpinan.

Dalam prakteknya kita sering menemukan adanya keengganan dalam hal pelaksanaan pelimpahan wewenang ini, karena terdapatnya rasa kesanggupan yang tinggi dari pimpinan untuk melaksanakan semua tugasnya sehingga merasa rugi untuk mengikutkan bawahan atau memang tidak mengerti manfaat dari pelimpahan wewenang tersebut.

Seorang pimpinan harus menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh manusia baik keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang mengharuskan pimpinan tersebut untuk berhubungan dengan orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di samping pemimpin harus sadar akan keterbatasan tersebut, maka bawahan juga harus siap dan yakin dalam menerima dan menjalankan wewenang yang dilimpahkan pemimpinnya.

Demikian juga halnya dengan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal mencapai tujuannya tidak mengenyampingkan pentingnya peranan dari pelimpahan wewenang tersebut, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal sebagai instansi pemerintah yang banyak berhubungan dengan masyarakat dalam pendidikan khususnya dalam hal peningkatan sumber daya manusia masyarakat secara luas.

Pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu hal yang tepat bila melihat lebih jauh arti dari pelimpahan wewenang itu sendiri, yakni :

“ proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya “. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1991, hal. 224..